

Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda

Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Peppy Forestry Anggraeni

(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya)

E-mail : peppyfa@yahoo.co.id

Dr. Hj. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd

(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya)

Abstrak

Penyelenggaraan program sekolah perempuan atau pemberdayaan perempuan membantu masyarakat, khususnya pada perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam mengakses pendidikan dalam menambah pengetahuan dan pengalaman. Hal ini menandakan bahwa proses pembekalan ilmu menentukan kemajuan seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang tergolong muda untuk menjadi mandiri dalam keluarga dan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) penyelenggaraan program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K, (2) kemandirian ibu muda dalam mengikuti program sekolah perempuan, (3) keterkaitan antara penyelenggaraan program sekolah perempuan dalam meningkatkan kemandirian ibu.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Tempat penelitian di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan simpulan. Setelah tahapan tersebut data diuji keabsahannya dengan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelenggaraan program sekolah perempuan mencakup sepuluh patokan pendidikan masyarakat dan sudah bekerja sesuai dengan fungsi serta perannya masing-masing menurut indikator pemberdayaan perempuan, di mana dapat dilihat dari penyelenggara yang memfasilitasi kebutuhan warga belajar, membantu warga belajar untuk mengakses kegiatan di Desa maupun diluar kegiatan Desa dan mengarahkan warga belajar dalam mencari haknya sebagai warga masyarakat miskin, (2) kemandirian ibu muda dalam mengikuti sekolah perempuan mampu meningkatkan kemampuannya yang sudah dimiliki yang ditandai dengan cara mendidik anak dan keluarga dengan baik dan benar serta keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan sekolah perempuan, kegiatan di Desa dan diluar kegiatan Desa. (3) keterkaitan penyelenggaraan sekolah perempuan dalam kemandirian ibu muda yaitu adanya penambahan wawasan dan pengalaman sehingga terbentuknya kepercayaan diri yang menjadikan ibu-ibu memiliki peningkatan kemandirian dalam keluarga dan lingkungannya.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Sekolah Perempuan, Kemandirian Ibu Muda, Pemberdayaan Perempuan

Abstract

Implementation of Women's School Program on KPS2K NGO (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) in Increasing the Independence of Young Mother in Kesamben Kulon village Sub Wringinanom Sub-Province of Gresik

Name : Peppy Forestry Anggraeni
NIM : 13010034076
Study Program : S-1
Major : Pendidikan Luar Sekolah
Faculty : Ilmu Pendidikan
Name of Institution : Universitas Negeri Surabaya
Advisor : Dr. Hj. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.

The implementation of women's school programs or women's empowerment helps community especially women for getting their rights in access to education in augment their knowledge and experience. This result indicates that the process of knowledge debriefing determines the progress of young mothers or

young housewives to be independent in the family and environment. This study aims to describe and analyze (1) the implementation of Women's School Program on KPS2K NGO, (2) the independence of young mothers in joining women's school programs, (3) linkage between the implementation of women's school programs in improving mother's independence.

The research approach used by the researchers is descriptive qualitative. The study was conducted in Kesamben Kulon Village, Wringinanom Sub-district, Gresik Regency. Data were collected using interview technique, observation, and documentation. The data is analyzed using data collection, data reduction, data presentation, verification and conclusion. For final stage the data is tested for its validity with credibility, dependability, and confirmability.

The results of the study show that (1) the implementation of women's school programs includes ten benchmarks of community education and has worked in accordance with their respective functions and roles according to women empowerment indicators, which can be seen from the organizers that facilitate the needs of the learning community, helping people for accessing activities in village or outside the village and also directing people learn for finding their rights as indigent society, (2) the independence of young mothers in joining the women's school is able to improve the ability they had been possessed which is characterized by how they educate their children and families properly, participation in women's schools, inside the village and outside village activities. (3) The linkage of women's schools implementation regarding to independence of young mothers is the addition of perception and experience, so this linkage has formed self-confidence that makes mothers have increased independence in the family and environment.

Keywords: Implementation of School of Women, Young Women Independence, Women Empowerment

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting bagi kehidupan suatu bangsa sebagai pembentuk agen pembangunan dan perubahan. Majunya pendidikan akan menentukan kemajuan bangsa, begitulah majunya pendidikan akan sangat memengaruhi kemajuan bangsa dan mundurnya pendidikan akan menjadikan bangsa ketertinggalan atau keterbelakangan dan kemiskinan. Menurut Nurhayati (2011:184), pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang terbebas dari unsur diskriminasi gender, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pendidikan tinggi, sama-sama berhak mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kekayaan hasil alam yang cukup melimpah karena kesuburan alam Indonesia dan didukung kuat oleh sumber daya manusia. Namun, kenyataan yang terjadi sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam ekonomi menengah kebawah. Kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi merupakan akibat ketidak mampuan masyarakat terhadap pendidikan yang seharusnya didapat.

Nurhayati (2011:187), Perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dalam masyarakat, tak terkecuali dalam masyarakat miskin. Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk memberikan kontribusi

bagi pembangunan masyarakat yaitu melalui pendidikan dan pengalaman belajar. Namun pada kenyataannya, perempuan masih belum diberi peran yang lebih, bahkan juga terpinggirkan. Kurangnya hak perempuan dalam memperoleh pendidikan menyebabkan permasalahan pada perempuan, salah satunya yaitu perkawinan diusia remaja. Perkawinan diusia remaja bisa terjadi karena perjodohan dari orang tua atau karna salah pergaulan. Perkawinan diusia remaja atau pernikahan dini menjadikan perempuan pasif dalam pembangunan masyarakat karena kurangnya pengetahuan.

Perkawinan dan kehamilan remaja perempuan masih menjadi masalah besar di dunia, khususnya di negara berkembang. Indonesia bahkan menempati urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja dalam jumlah perkawinan remaja (Kompas, 2015). Data pada Unicef tertera bahwa susenas 2008- 2012 presentase perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2008- 2012 yaitu memiliki rata- rata sejumlah 25,4 sedangkan presentase perempuan di Jawa Timur sejumlah 27,8 dan presentase menurut daerah tempat tinggal bahwa di perkotaan memiliki rata- rata sejumlah 18,7 sedangkan di daerah pedesaan rata- ratanya 30,4. Perkawinan setelah anak perempuan mencapai usia 16 tahun menunjukkan bahwa

perkawinan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih dianggap wajar di banyak daerah di Indonesia. Perkawinan usia anak tidak hanya mendasari, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia anak dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agenda pembangunan pasca 2015 secara khusus telah mulai menangani perkawinan usia anak, dini, dan paksa. Laporan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada bulan Desember 2014, menyatakan bahwa "praktik perkawinan usia anak, dini, dan paksa harus diakhiri di mana saja". Indikator sasaran untuk menangani perkawinan usia anak berada di bawah Tujuan Pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan sehingga, jika setiap penundaan satu perkawinan dapat berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan melek huruf dan menyelesaikan sekolah menengah.

Apabila melihat kehidupan di pedesaan sektor pendidikan masih sangat kurang dalam memperoleh pemerataan akses pendidikan, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan masih kurangnya minat dan kesadaran masyarakat desa dalam memperoleh pendidikan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan sumber daya yang dimiliki masyarakat pedesaan masih kurang sebab yang perlu diperhatikan pada pedesaan yaitu masih terbatasnya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Perempuan masih dinomorduakan dan laki-laki selalu menjadi prioritas. Pada umumnya, profil perempuan atau ibu (dewasa) di pedesaan adalah miskin, dibebani berbagai jenis pekerjaan, kurangnya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Pentingnya bagi perempuan atau ibu (dewasa) untuk mempunyai ilmu pengetahuan agar memiliki bekal ilmu pengetahuan dalam kehidupan rumah tangga dan untuk mengontrol masalah-masalah ketika memasuki dunia berkeluarga. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perempuan atau ibu (dewasa) yang memasuki dunia berkeluarga mempunyai bekal ilmu pengetahuan

sehingga perempuan atau ibu (dewasa) pedesaan kurang memiliki kemandirian terutama kemandirian secara perilaku. Nurhayati (2011:185), Masyarakat pedesaan berasumsi bahwa pendidikan hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang mau bergerak dengan mobilitas tinggi yang menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca buku, melakukan eksperimen berjam-jam, meneliti di lapangan, menulis dan berdiskusi dalam sisa waktunya, dan jika ini dilakukan oleh perempuan akan mengakibatkan mereka kehilangan identitas kewanitannya karena tidak memiliki waktu untuk melakukan tugas-tugas wanita di rumah tangga dan keluarganya, serta masyarakat beranggapan bahwa perempuan dengan peran rumah tangga untuk mengasuh dan merawat anak, tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi, melainkan cukup hanya mampu membaca dan menulis sekedar dapat mendidik anak-anak di awal kehidupannya.

Ketertinggalan kaum perempuan dalam pendidikan tidak dengan sendirinya merupakan kesalahan usaha perempuan sendiri untuk belajar, melainkan karena kultur yang timpang yang menekankan lebih berat kepada laki-laki daripada perempuan dalam berpendidikan. Menurut Nurhayati (2011:191), berpendapat bahwa ketertinggalan perempuan dalam berpendidikan disebabkan oleh faktor kondisi sosial politik, motivasi berprestasi dan *self esteem* perempuan lebih rendah daripada laki-laki, tidak memperoleh akses dan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam berpendidikan, perempuan masih banyak dikucilkan, dan kondisi sosial politik dan kultural masih belum dapat ditembus oleh kaum perempuan untuk mendobrak kesenjangan akses berpendidikan seperti yang dicapai kaum laki-laki, dan lain-lain. Faktor tersebut menjelaskan bahwa ketertinggalan perempuan disebabkan oleh faktor eksternal daripada faktor internal. Hak dan kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk mengakses pendidikan tidak sama dengan hak yang diberikan pada laki-laki. Fenomena yang masih terjadi sampai sekarang menunjukkan "semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan di dalamnya. Semakin sulit ilmu yang ditekuni, semakin sedikit jumlah perempuan di dalamnya". Dengan adanya program pendidikan untuk perempuan maka perempuan memperoleh kesempatan ilmu pengetahuan dalam

pendidikan keluarga mengenai kepedulian terhadap keluarga, masyarakat dan Negara (pemerintah).

Keteringgalan perempuan dalam pendidikan, maka perlu adanya perubahan yang relevan dalam mengatasi problematika perempuan. Pendidikan luar sekolah dirasa sangat memiliki peranan penting dalam upaya mengurangi dan mengatasi probelematika tersebut. Pendidikan Nonformal dalam Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa definisi pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Menurut Yulianingsih (2013:73), Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan belajar secara wajar dan luas kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah kelompok perempuan, yang kemudian disebut pemberdayaan perempuan. Adapun fungsinya ialah untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Kondisi fenomena di Indonesia nampak di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah penduduk yang berkeluarga dalam 16 Desa sebanyak 22.415 dengan data pasangan usia subur sebanyak 5.618 pasangan dalam 6 Desa, jumlah yang berpendidikan SD-SMA/SMK sebanak 8.266 anak, sebagian kurang lebih 2.942 anak yang putus sekolah dan menikah di usia remaja, diperkuat dengan adanya informasi pada media cetak bahwa angka pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wringinanom, kutipan tersebut adalah "Di Gresik ada tren peningkatan perempuan yang menikah sebelum berusia 21 tahun. Data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Gresik menyebut bahwa emuan

terbanyak ada di Kecamatan Wringinanom" (Surya, 2016).

Kecamatan Wringinanom terdapat Desa yang mayoritas masih kurang sentuhan akan pendidikan, Desa tersebut salah satunya adalah Desa Kesamben Kulon. Jumlah penduduk Desa Kesamben Kulon pada tahun 2014 sebanyak 5562 jiwa terdiri dari laki-laki 2323 jiwa dan perempuan sebanyak 3239 jiwa dan pasangan usia subur sebanyak 1.375 pasangan. Desa Kesamben Kulon mayoritas masyarakatnya tamatan SD dan SMP bahkan ada yang tidak tamat SD serta masih terdapat warga yang buta huruf yang mayoritasnya adalah kaum perempuan. Randahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan, serta partisipasi perempuan di Desa masih sangat terbatas, hal tersebut karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki perempuan atau pendidikan rendah.

Permasalahan yang terjadi pada daerah tersebut dapat diminimalisir melalui pendidikan luar sekolah salah satunya yaitu program pemberdayaan perempuan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan sebenarnya sudah menjadi program yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015- 2019. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki visi yang sesuai dengan penelitian ini, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan tercapainya program pemerintah diperlukan adanya pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah tidak pernah mengenal batasan sasaran melainkan menyeluruh dari anak hingga orang dewasa baik perempuan maupun laki- laki. Pendidikan nonformal terpusat pada upaya penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pendidikan untuk diperdayakan sesuai kebutuhan individu. Menurut Astuti (2007) dalam Naskah Akademik Pendidikan Nonformal Program Pemberdayaan Perempuan (2014:1), memandang

bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses pembentukan kesadaran dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi masyarakat yang beraktivitas atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran terhadap keadaan sosial di masyarakat dan menurut Jalal, F, Kazi (1999) dalam Zubaedi (2013:89), Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan dengan sebuah idealisme untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, perbaikan kesejahteraan kelompok marginal, perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan, perlindungan lingkungan atau sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.

Kehadiran LSM pada daerah tersebut membantu dalam permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pedesaan atau ibu-ibu muda dengan membantu dan mewujudkan program pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Program Pemerintah tersebut khususnya pada perempuan yaitu dengan mengetaskan permasalahan perempuan terutama di daerah Kecamatan Wringinanom, LSM tersebut yaitu LSM KPS2K (kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan), LSM KPS2K bergerak dibidang pemberdayaan, dengan berlalunya waktu dan dengan adanya program sekolah perempuan atau pemberdayaan perempuan yang diadakan oleh LSM KPS2K keadaan perempuan mulai membaik tapi langkah kemajuan sangat perlahan karena proses pembekalan ilmu yang menentukan kemajuan seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang tergolong muda untuk menjadi seorang ibu muda yang mandiri dalam keluarga dan lingkungannya.

Program sekolah perempuan diselenggarakan di Kabupaten Gresik Kecamatan Wringinanom dan dibentuk di empat Desa yaitu Desa Sooko, Kesamben Kulon, Mondoluku, dan Sumber Gede, dan terdapat 15 kelompok dalam satu Kecamatan. Data jumlah anggota warga belajar

per tahun 2016 yaitu Mondoluku sebanyak 85 orang, Sumber Gede 207 orang, Kesamben Kulon 368 orang, dan Sooko 240 orang. Dengan banyaknya jumlah warga belajar pada Desa Kesamben Kulon menandakan bahwa tingkat kesadaran perempuan lebih besar dalam membutuhkan pendidikan dalam menambah wawasan, banyak keikutsertaan ibu-ibu muda dalam kegiatan-kegiatan baik di lingkungan Desa maupun di tingkat pemerintah Kabupaten, dan adanya dukungan sendiri dari pemerintah Desa Kesamben Kulon dalam adanya program sekolah perempuan sebagai wujud dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut program yang diselenggarakan oleh LSM sehingga peneliti mengambil judul penelitian "*Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*"., selanjutnya dapat diurai dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : (1) penyelenggaraan program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K, (2) kemandirian ibu muda dalam mengikuti program sekolah perempuan, (3) keterkaitan antara penyelenggaraan program sekolah perempuan dalam meningkatkan kemandirian ibu.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: penyelenggaraan program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan), kemandirian ibu muda dalam mengikuti program sekolah perempuan, dan keterkaitan antara penyelenggaraan program sekolah perempuan dalam meningkatkan kemandirian ibu muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Aritonang dalam Hasanah (2013:74), mendeskripsikan pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang. Sedangkan dalam Naskah Akademik Pendidikan Nonformal Program Pemberdayaan Perempuan

(2014:13), menjelaskan bahwa Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana dalam memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Menurut Mead (1959) dalam Mardikanto (2013:68), Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui” melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif. Sehingga keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari seberapa jauh terjadi transfer pengetahuan, ketrampilan atau perubahan perilaku, tetapi seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman (*sharing*).

Yulianingsih (2013: 77-78) Sepuluh patokan pendidikan masyarakat adalah pegangan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. (1) warga belajar adalah mereka yang mempunyai kemampuan belajar (*educable, trainable*), jelas kemauan (hasrat belajarnya, jelas pengetahuan, pengertian, pengalaman, keterampilan dan akal) yang mau dipelajarinya, dan telah tergerak hatinya untuk belajar, (2) ragi belajar adalah zat yang dapat menumbuhkan proses belajar spontan yang mendatangkan hasil dan menghasilkan ragi baru untuk belajar lebih lanjut, (3) sumber belajar adalah warga masyarakat yang memiliki ilmu dan kemauan serta skill, yang bersedia di pelajari, digurui dan dimagangi oleh siapa saja yang memerlukannya dengan syarat yang ringan atau kalau mungkin tanpa syarat, (4) paguyuban belajar adalah para warga belajar yang menghimpun diri dalam kelompok kaena sama-sama memiliki hasrat belajar, sama-sama ingin belajar, ingin belajar bersama atau ingin saling belajar, (5) pamong belajar adalah sebuah organisasi yang warganya terdiri dari warga masyarakat sendiri yang mempunyai tekad dan itikad meningkatkan taraf pendidikan sesamanya melalui proses belajar, pamong adalah sutradara belajar, (6) tempat belajar adalah tempat yang memenuhi persyaratan minimal untuk bisa berfungsi sebagai dan atau dapat menampung kegiatan belajar warga masyarakat atau warga belajar, (7) sarana belajar adalah bahan, alat perkakas, perabot, dan kelengkapan minimal lainnya yang mutlak diperlukan agar ragi belajar dapat berproses, (8) dana belajar adalah barang, uang atau jasa yang secara minimal diperlukan untuk menjamin

kelestarian atau menjalankan kegiatan atau proses belajar yang murah tapi bermanfaat bagi arga belajar dan masyarakat disekitarnya, (9) program kegiatan belajar adalah serangkaian usaha atau acara belajar yang disusun bersama dalam musyawarah warga belajar dan warga masyarakat lainnya, dan (10) hasil belajar atau produk kegiatan belajar, adalah hasil belajar sebagai proses belajar.

Mu'tadin (2002) dalam Nurhayati (2011:132), bahwa kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mau mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Menurut Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133) membedahkan aspek kemandirian atas 3 aspek, yaitu Kemandirian emosional (*emotional autonomy*), Kemandirian tingkah laku (*behavior autonomy*), Kemandirian nilai (*value autonomy*). Sementara itu, Robert Havighurst (1972) dalam Fatimah (2006) menyebutkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian dilaksanakan di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik karena di desa Kesamben Kulon terdapat program sekolah perempuan yang diselenggarakan oleh LSM KPS2K dengan Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah koordinator program *gender watch* (Direktur KPS2K), dua staf lapangan (fasilitator sekolah perempuan), dan tujuh orang ibu muda yang mengikuti sekolah perempuan.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan fokus yang telah ditentukan. Jenis dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi.

Proses analisis data merupakan suatu aktivitas yang dilakukan terus menerus sampai data

yang dikumpulkan selesai. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara data yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. kriteria keabsahan data dalam penelitian ini adalah, kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Roger dalam Naskah Akademik Pendidikan Nonformal Program Pemberdayaan Perempuan (2005:78), Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari aktifitas yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani belajar peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan nonformal melayani pendidikan kepada masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak. Bentuk program pendidikan nonformal yang diberikan oleh masyarakat salah satunya yaitu program pendidikan pemberdayaan perempuan, Kindervater dalam Anwar (2007: 77), bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Terselenggaranya pendidikan pemberdayaan perempuan maka acuan yang dapat digunakan yaitu menggunakan 10 patokan pendidikan masyarakat, menurut Yulianingsih (2013: 77-78) Sepuluh patokan pendidikan masyarakat adalah pegangan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa 10 patokan pendidikan masyarakat berperan penting dalam menentukan arah sebuah penyelenggaraan program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.

1. Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan di Gresik oleh KPS2K

a. Warga Belajar

Data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa warga belajar yang mengikuti sekolah perempuan memiliki minat yang tinggi untuk belajar yaitu dengan adanya kehadiran warga belajar pada setiap kegiatan yang ada di sekolah perempuan maupun di kegiatan Desa serta keikutsertaan ibu muda pada materi – materi yang diberikan oleh sekolah perempuan dan warga belajar tidak ada paksaan dalam mengikuti sekolah perempuan sebab ibu-ibu ada yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh pabrik.

Yulianningsih dan Lestari (2013: 78), Warga belajar adalah mereka yang mempunyai kemampuan belajar (*educable, trainable*), jelas kemauan (hasrat belajarnya, jelas, pengetahuan, pengertian, pengalaman, keterampilan dan akal) yang mau dipelajarinya, dan telah tergerak hatinya untuk belajar.

b. Ragi Belajar

Bentuk ragi belajar dalam sekolah perempuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk uang, melainkan tindakan yang mampu memotivasi sebagai ragi belajar yang lebih utama, untuk memunculkan kondisi tersebut dapat diupayakan penyelenggaraan sekolah perempuan maupun staf lapangan (*fasilitator*) dan koordinator program *gender watch* sejak awal sebelum pelaksanaan program dengan melakukan pendekatan kepada warga masyarakat melalui komunikasi dalam mempengaruhi mereka untuk terlibat mengikuti program ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sihombing (2002:12) bahwa ragi belajar adalah sesuatu yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar sehingga proses pembelajaran terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan yang ada pada ragi belajar itu sendiri.

c. Sumber Belajar

Sumber belajar yang dipergunakan pada sekolah perempuan yaitu staf

lapangan (fasilitator), koordinator program *gender watch* dan bahan ajar/modul pembelajaran, namun apabila kegiatan yang membutuhkan pemateri dari luar maka sekolah perempuan mendatangkan pemateri yang ahli dibidang tertentu sedangkan untuk staf lapangan (fasilitator) dan koordinator program *gender watch* tidak ditentukan dari segi pendidikan tapi dari ketersediaan dalam melayani masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yulianingsih dan Lestari (2013:78), Sumber belajar adalah warga masyarakat yang memiliki ilmu dan kemauan serta skill, yang bersedia di pelajari, digurui dan dimagangi oleh siapa saja yang memerlukannya dengan syarat yang ringan atau kalau mungkin tanpa syarat.

d. Paguyuban Belajar (kelompok belajar)

Kelompok belajar dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai hal yaitu berdasarkan lokasi tempat rumah warga belajar untuk memungkinkan dapat mengikuti pembelajaran secara bersama sehingga tiap Dusun memiliki kelompok sekolah perempuan atau kelompok tingkat Dusun kemudian terdapat kelompok tingkat Desa yang anggotanya perwakilan dari tingkat Dusun atau *leader* Dusun yang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan di luar untuk diikuti namun disesuaikan dengan kriteria dan kesanggupan ibu-ibu dan memiliki tugas sebagai penyampai materi ditingkat Dusun yang disampaikan oleh koordinator *gender watch* ketika di tingkat Desa namun juga didampingi oleh staf lapangan. Banyaknya warga belajar atau anggota sekolah perempuan Desa Kesamben Kulon, maka harus dibentuk kelompok belajar atau paguyuban belajar. Menurut Sihombing (2002:13), kelompok belajar adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama dan bersepakat untuk saling membelajarkan.

Peneliti menemukan kelompok belajar terdiri dari delapan kelompok dalam satu Desa yaitu kelompok SP (sekolah perempuan) Hebat di Dukun kulon, SP suka tani di Dukun Krajan, SP suka belajar di Dukun Kluwung, SP mandiri di Dukun Krajan, SP maju berjuang di Dukun Wetan, SP sejati di Dukun Randusongo, SP bangkit di Dukun Randusongo, dan SP pembawa kemajuan di Dukun Kidul.

e. Pamong Belajar

Peneliti menemukan bahwa yang bertindak sebagai pengurus maupun penyelenggara program yaitu koordinator program *gender watch*, staf lapangan, dan tokoh masyarakat yang bertindak mengatur proses penyelenggaraan dari tahap awal hingga berjalannya kegiatan, memantau perkembangan setiap tahap kegiatan, memberikan sarana prasarana yang ada, serta bersedia dengan suka rela memberikan pengetahuan kepada warga belajar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yulianingsih dan Lestari (2013:78) bahwa pamong belajar (pamong) yaitu sebuah organisasi yang warganya terdiri dari warga masyarakat sendiri yang mempunyai tekad dan itikad meningkatkan taraf pendidikan sesamanya melalui proses belajar, pamong adalah sutradara belajar.

f. Tempat Belajar

Tempat belajar sekolah perempuan disini fleksibel sehingga tidak hanya pada satu titik yaitu pada Balai Dusun, Desa, Mushola, dan rumah warga belajar yang sekiranya dapat menampung anggota sekolah perempuan, sedangkan untuk tempat administrasi atau posko sekolah perempuan terletak di Desa Sooko yang bertujuan mempermudah warga belajar berkomunikasi dengan staf lapangan. Hal tersebut sependapat dengan Yulianingsih dan Lestari (2013:78) bahwa tempat belajar yaitu tempat yang memenuhi persyaratan minimal untuk bisa berfungsi sebagai dan atau dapat menampung kegiatan belajar warga masyarakat atau warga belajar.

g. Sarana Belajar

Sarana belajar di sekolah perempuan tidak membutuhkan banyak fasilitas karena sekolah perempuan menggunakan metaplan dalam menyampaikan materi sehingga hanya menggunakan kertas dan spidol, namun apabila pembelajaran di adakan di Balai Desa maka sekolah perempuan menggunakan papan tulis dan lainnya yang tersedia sehingga sekolah perempuan hanya menggunakan fasilitas umum yang ada di Desa. Hal tersebut sependapat dengan Yulianingsih dan Lestari (2013:78) bahwa sarana belajar yaitu bahan, alat perkakas, perabot, dan kelengkapan minimal lainnya yang mutlak diperlukan agar rang belajar dapat berproses.

h. Dana Belajar

Sumber dana belajar dalam bentuk sosial pada program *gender watch* di dapat dari pemerintah Kabupaten Gresik sedangkan dukungan pendanaan , program *gender watch* memperoleh kerjasama dengan pemerintah Australia sehingga pemerintah Indonesia memiliki kerjasama dengan pemerintah Australia melalui Bapenas yang dihubungkan melalui Institut Kapal Perempuan Jakarta yang merupakan lembaga induk yang membawahi lima provinsi di Indonesia yaitu Sumbar, Sulsel, NTT, NTB, dan Jatim. Dana belajar program *gender watch* juga diperoleh dari CSR (*corporate social responsibility*).

Yulianingsih dan Lestari (2013:78) menyatakan bahwa dana belajar juga memegang peranan penting dalam sebuah kegiatan, dana belajar adalah barang, uang atau jasa yang secara minimal diperlukan untuk menjamin kelestarian atau menjalankan kegiatan atau proses belajar yang murah tapi bermanfaat bagi warga belajar dan masyarakat disekitarnya. Dari keterangan warga belajar bahwa tidak ada tarikan dalam mengikuti kegiatan di sekolah perempuan bahkan warga belajar apabila kegiatan harus keluar Desa atau

Kota warga belajar mendapat uang transport.

i. Program Kegiatan Belajar

Program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. sehingga warga belajar menjadi pemilik dari program tersebut. Dalam pengorganisasian materi belajar, warga belajar benar-benar dilibatkan dalam menentukan sitematika kegiatan belajar dengan menawarkan kegiatan-kegiatan agar kesesuaian kebutuhan warga belajar dapat terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan Sihombing (2002:13) bahwa program belajar adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, dll.

Program kegiatan belajar ini dapat diamati pada setiap kegiatan-kegiatan sekolah perempuan yaitu melalui:

- 1) kegiatan pembuatan bank sampah.
- 2) kegiatan sanggar tari dan rias
- 3) kegiatan membuat koran gema perempuan perdesaan
- 4) kegiatan pertanian berkelanjutan
- 5) kegiatan radio komunitas
- 6) Kegiatan pemeriksaan IVA

Materi yang diberikan pada ibu-ibu yaitu terkait dengan pendidikan adil gender yang membahas tentang persiapan sosial, gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan, membangun organisasi, dan penguatan ekonomi perempuan. Program kegiatan sekolah perempuan juga mendatangkan materi dari luar apabila kegiatan tersebut harus memerlukan tenaga ahli.

j. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah sejauh mana kemampuan ibu-ibu dalam bersuara dengan menceritakan pengalamannya dan pendapatnya sehingga sudah dapat dikatakan mulai muncul kepercayaan dirinya yang kemudian dapat memunculkan jiwa kepemimpinan . hal tersebut sependapat dengan Sihombing (2002:14) hasil belajar diartikan sebagai yang nyata dari setiap kegiatan kelompok

belajar yang dapat dinikmati bersama oleh warga belajar. Hasil belajar adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran tertentu dilalui dalam kurun waktu tertentu.

Warga belajar kini mulai punya akses untuk keluar Desa yaitu dengan mengikuti musrembang di Kabupaten Gresik, Workshop, Bazar, undangan dari universitas dalam mengisi suatu acara, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Kemandirian Warga Belajar dalam mengikuti Program Sekolah Perempuan

Ife dalam Huraerah (2011:99) yang dikutip Suharto (2005), pemberdayaan sebagai proses yang artinya serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Mu'tadin (2002) dalam Nurhayati (2011:132), bahwa kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mau mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Berikut pembahasan tentang kemandirian ibu muda di Desa Kesamben Kulon:

a. Membuat Keputusan dan Tidak Cemas

Hasil pengumpulan data, masyarakat Desa Kesamben Kulon

khususnya kaum perempuan yang semula hanya memiliki rasa takut, diam karena kurangnya pengetahuan, dan hanya bergantung dengan pemikiran suaminya sekarang sudah berani memberikan suara atau pendapat yaitu ketika ada musrembang (musyawaran perencanaan pembangunan) di Desanya yang awalnya hanya datang, duduk dan diam, ibu-ibu bahkan mampu berbicara baik dan sopan tanpa punya rasa takut dan hal tersebut juga nampak ketika ibu-ibu mampu meyakinkan suaminya saat ada permasalahan di keluarganya dan berkomunikasi secara baik ketika meminta izin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sebab para suami awalnya melarang seorang perempuan untuk tidak keluar rumah yang terlalu lama. Kemandirian dalam membuat keputusan dan tidak cemas menjadi kemandirian pada aspek nilai, menurut Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133) yang artinya kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan tidak penting.

b. Mampu Mengontrol Dirinya (Tidak Mudah Marah)

Mampu mengontrol dirinya atau tidak mudah marah ditunjukkan ketika ibu-ibu muda yang awalnya mendidik anaknya dengan keras dan memaksakan keinginan ibunya, kemudian setelah mendapat pembelajaran mengenai mendidik anak yang baik dan benar ibu-ibu mulai sadar dan mencoba merubah dengan mendidik anak yang diajarkan oleh pemateri, terbukti ketika ibu-ibu mengontrol hawa marah terhadap anaknya dan membebaskan apa yang diinginkan anak namun tetap dalam pengawasan orang tua dan anak lebih menjadi anak penurut. Tidak mudah marah juga nampak ketika ibu-ibu berdiskusi yang terlihat kompak dan tidak individualis, hal tersebut menandakan bahwa ibu-ibu tidak memiliki ego yang tinggi yang tidak merugikan orang lain dan berlapang dada jika idea tau

pendapatnya tidak diterima dengan ibu-ibu lainnya. Menurut Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133), kemandirian tersebut menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Mampu mengontrol dirinya atau tidak mudah marah merupakan kepribadian seseorang yang memberikan kesan tentang sesuatu dan punya pendirian tentang menyikapi suatu keadaan yang terjadi, hal tersebut ketika ibu-ibu menceritakan dalam mendidik anak sebelum mengikuti sekolah perempuan dan setelah mengikuti.

c. Menunjukkan Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri dan Orang Lain

Beranggungjawab yang dimaksud pada masyarakat Kesamben Kulon terutama pada kaum perempuan adalah timbulnya rasa kemauan dan kemampuan dari ibu-ibu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah didiskusikan. Bila dikaitkan dengan rumusan penelitian tentang dampak dari penyelenggaraan program sekolah perempuan di Desa Kesamben Kulon, warga belajar yang mengikuti terbukti dapat memiliki semangat baru dalam berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peminatan ibu-ibu muda di Desa serta untuk lebih aktif di Desanya yaitu dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan pembangunan Desa.

Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133) bahwa Kemandirian tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain suatu kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukan secara bertanggungjawab. Tanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain artinya seseorang tidak bergantung dengan orang lain dan mampu melakukan segala hal dengan penuh tanggungjawab dan dilakukan secara sadar, dalam penelitian ini kepribadian ibu muda nampak ketika ibu-ibu mengadakan kegiatan yang mampu memanfaatkan

SDM dan SDA yang dimilikinya serta dapat diketahui pada pemegang kegiatan yang ada di Dusun dari awal hingga sekarang adalah ibu-ibu yang belum pernah digantikan oleh orang lain, hal ini bertanda bahwa ibu-ibu memiliki tanggungjawab dalam memegang kegiatan.

d. Berani Mengambil Resiko

Resiko yang harus dihadapi biasanya datang dari keluarga, lingkungan sekitar, dan kegiatan-kegiatan sekolah perempuan, disamping itu juga harus bisa memprediksi tantangan dan hambatan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, misalnya bagaimana mensiasati resiko ketika ada kegiatan diluar kota yang mengharuskan menginap selama beberapa hari, kondisi alam yang tidak mendukung kegiatan-kegiatan sekolah perempuan, resiko ketika tidak memperoleh izin dari pihak keluarga untuk mengikuti, dan resiko-resiko lainnya. Semua resiko yang biasanya dihadapi oleh ibu-ibu tersebut, maka ibu-ibu harus dapat menjelaskan kepada semua pihak terkait tujuan yang diinginkan sehingga ibu-ibu dapat mengantisipasi resiko-resiko yang nampaknya akan terjadi dan mempersiapkan sebaik mungkin.

Sikap untuk siap menghadapi resiko ditunjukkan dengan kesiapan ibu-ibu ketika ibu-ibu harus berdiskusi yang mengharuskan untuk pulang malam baik diskusi dengan anggota sekolah perempuan maupun pihak balai Desa, yang awalnya mempuyai tradisi bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar malam bahkan pergi dari rumah untuk beberapa hari karena perempuan dianggap hanya memiliki tugas dirumah saja. Pernyataan tersebut menurut Robert Havighurst (1972) dalam Fatimah (2006) menyatakan berani mengambil resiko ditunjukkan dengan aspek intelektual yang artinya kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

e. Memiliki Kepercayaan Diri

Percayaan diri yaitu seseorang yang dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang lebih sehingga seseorang tersebut mampu percaya akan hasil pemikiran yang menurutnya tidak merugikan orang lain dan tidak memiliki keraguan. Data temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dengan keahlian yang dimiliki warga belajar ketika mengikuti kegiatan-kegiatan nampak ibu-ibu mampu menampilkan kreasi yang dimiliki yakni menari, menyanyi, membacakan puisi, menulis artikel yang diterbitkan di media cetak yaitu koran perempuan pedesaan dan sebagainya. hal tersebut menandakan adanya peningkatan kepercayaan diri dalam ibu-ibu yang awalnya hanya diam di dalam rumah.

Robert Havighurst (1972) dalam Fatimah (2006), kemandirian dalam memiliki kepercayaan diri tergolong dalam aspek sosial yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi orang lain. Hal ini ditandai ketika ibu-ibu dapat menyalurkan ketrampilan atau ahli yang dimilikinya dan memiliki kepercayaan diri yang lebih, misalnya ketika ibu-ibu mampu menyuarakan pendapatnya atau ide-idenya, ibu-ibu mampu menampilkan puisi, ibu-ibu mampu menampilkan tarian-tariannya, dan sebagainya, hal tersebut menandakan bahwa ibu-ibu memiliki kepercayaan diri yang lebih setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah perempuan.

3. Keterkaitan antara Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda

Penyelenggaraan program sekolah perempuan dalam konteks pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan kemandirian di berbagai aspek sebagai proses perubahan diri masyarakat secara partisipasi menuju kesejahteraan dan kemandirian, hal tersebut selaras dengan Naskah Akademik Pendidikan Nonformal Program

Pemberdayaan Perempuan (2014:13), menjelaskan bahwa Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana dalam memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini dikemas dengan istilah sekolah perempuan dari program *gender watch* pada LSM KPS2K, program sekolah perempuan atau pemberdayaan perempuan ini menitik beratkan kepada masyarakat khususnya yaitu masyarakat perempuan, dengan proses belajar mengajar dengan memberikan materi-materi pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu, dan menjadi perempuan yang lebih mandiri. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Tim Deliveri (2004) dalam Mardikanto (2013:76), mengartikan pemberdayaan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Kemandirian warga belajar pada program sekolah perempuan tersebut nampak pada ibu-ibu muda yang awalnya hanya diam dirumah atau sebagai warga masyarakat yang pasif karena kurangnya pendidikan dan pernikahan dini yang melanda kaum perempuan sehingga menjadikan masyarakat yang kurang mandiri atau hanya menggantungkan kepada suaminya, namun setelah mengikuti program sekolah perempuan ibu-ibu muda nampak ada perubahan baik dalam berpikir maupun bersikap, hal tersebut terlihat ketika keterlibatan ibu-ibu dalam kegiatan Desa yaitu baik dalam diskusi maupun keterlibatan dalam acara serta nampak dalam mendidik anak dan keluarganya. Kemandirian tersebut sependapat dengan Mu'tadin (2002) dalam Nurhayati (2011:132) yang menyatakan bahwa kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya,

mau mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Kemandirian yang dimiliki ibu-ibu muda di atas menurut Steinberg (1993) dalam Nurhayati (2011:133) mencakup tiga aspek yaitu kemandirian emosional (*emotional autonomy*), kemandirian tingkah laku (*behavior autonomy*), dan kemandirian nilai (*value autonomy*). Sedangkan menurut Robert Havighurst (1972) dalam Fatimah (2006) terdapat empat aspek kemandirian yaitu emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. perubahan tersebut meliputi peningkatan dan perubahan sumber daya manusia sehingga mampu membangun masyarakat di lingkungannya.

PENUTUP

1. Penyelenggaraan program sekolah perempuan oleh LSM KPS2K menerapkan 10 patokan pendidikan masyarakat yang terdiri dari yakni: (a) warga belajar terdiri dari ibu-ibu yang kurang mendapatkan akses pendidikan, (b) raga belajar sekolah perempuan yaitu koordinator program *gender watch* dan staf lapangan, (c) sumber belajar yang digunakan sekolah perempuan yaitu dengan menggunakan modul PAG (pendidikan adil gender), (d) paguyuban belajar di Desa Kesamben Kulon terdapat delapan kelompok, (e) pamong belajar pada sekolah perempuan ini terdiri dari koordinator program *gender watch*, staf lapangan, dan tokoh masyarakat baik pemerintah Desa maupun ulama yang ada di Desa, (f) tempat belajar sekolah perempuan yaitu pada balai Dusun, balai Desa, Mushola, dan rumah ibu-ibu yang sekiranya dapat menampung anggota sekolah perempuan, (g) sarana belajar menggunakan metaplan dalam menyampaikan materi, (h) dana belajar diperoleh dari pemerintah Kabupaten Gresik, institute kapal perempuan Jakarta, dan memperoleh dari CSR, (i) program kegiatan belajar selain pemberian materi juga terdapat kegiatan lain yaitu kegiatan pembuatan bank sampah, sanggar tari dan rias, membuat koran gemala perempuan perdesaan, pertanian berkelanjutan, dan radio komunitas, (j) hasil belajar yaitu ditandai dengan bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai ibu muda setelah proses pembelajaran dan membentuk sikap kemandirian.
2. Keseluruhan unsur dan komponen telah dilaksanakan secara sinergi sehingga mampu memberikan peningkatan pengetahuan sikap dan ketrampilan bagi ibu muda untuk menunjang dalam peningkatan kemandirian, hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari perubahan kondisi sosial ibu muda saat ini setelah adanya program sekolah perempuan. Kemandirian ibu muda yang mengikuti program sekolah perempuan mampu meningkatkan kemampuannya yang sudah dimiliki sebelumnya yaitu dalam membuat keputusan dan tidak cemas, mampu mengontrol dirinya (tidak mudah marah), menunjukkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, berani mengambil resiko, dan memiliki kepercayaan diri, hal tersebut ditunjukkan ketika ibu-ibu mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Desa maupun diluar Desa yaitu dengan keterlibatan dalam berdiskusi dan mengisi acara-acara pada kegiatan, dan tidak hanya pada kegiatan saja peningkatan kemandirian yang dimiliki ibu-ibu yaitu juga terlihat ketika ibu-ibu mampu mendidik anak dan keluarganya, sehingga menjadikan ibu muda memiliki penambahan wawasan dan pengalaman serta terbentuknya kepercayaan diri.
3. Keterkaitan antara penyelenggaraan program sekolah perempuan pada LSM KPS2K dalam meningkatkan kemandirian ibu muda yaitu dengan mengajarkan mengenai pendidikan adil gender yang membawa ibu-ibu muda dalam peningkatan kemandirian pada aspek-aspek emosional, tingkah laku, nilai, intelektual, dan sosial, sehingga program sekolah perempuan membawa dampak positif bagi ibu-ibu muda yang kurang mendapat pendidikan dan mengalami pernikahan dini.

Saran

Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis data dan pembahasan serta ditarik kesimpulan, meskipun secara keseluruhan penyelenggaraan program sekolah perempuan pada LSM KPS2K sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun masih perlu adanya peningkatan pengembangan yang di lakukan dalam beberapa hal, diantaranya :

1. Mengingat proses perubahan ibu muda tidak dalam waktu yang singkat, perlu adanya pendampingan yang maksimal dari lembaga KPS2K dan pemerintah Desa dalam menjaga terselenggaranya program sekolah perempuan.
2. Perlu adanya strategi pemasaran yang baik agar produk yang dihasilkan ibu muda dapat tersebar di wilayah perkotaan.
3. Dapat meningkatkan kerjasama kelompok dalam pembagian tugas di kegiatan masing-masing atau saling membantu dalam terselenggaranya kegiatan disetiap Dusun dan mampu mengembangkan ketrampilan yang sudah dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, Lusia Kus. 2015. *Indonesia urutan kedua tertinggi Pernikahan Remaja*. Kompas. 13 Desember 2015. Online. <http://health.kompas.com>. Diakses 15 Maret 2017
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung:alfabeta.
- Fatimah, Enung.2006. *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasanah, Siti. 2013. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*. Sawwa. Vol 9 No 1. (online). [http:// goo.gl/0B6Ku7](http://goo.gl/0B6Ku7). diakses 22 Januari 2017.
- Kemendikbud _____. 2014. *Naskah Akademik Pendidikan Nonformal Program Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, Eti. 2011. *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Peraturan Menteri Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015- 2019.
- Sihombing, Umberto. 2002. *Pendidikan Berbasis masyarakat*. Jakarta: CV Multiguna Falah Production
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2006. Bandung: Fokus Media.
- Unicef _____. 2015. *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkainan Anak Usia Anak di Indonesia.(online)*. <https://www.unicef.org/indonesia/id>. diakses 12 Maret 2017.
- Yulianingsih, Wiwin dan Gunarti Dwi Lestari. 2013. *Pendidikan Masyarakat*. Surabaya : Unesa University Press.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*. Jakarta : PT.Fajar Interpretama Mandiri.